



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



isn
tumkan dan menyebutkan sumber:
sian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
DESA SEI BEBERAS HILIR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA
KABUPATEN INDRAGIRIHULU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

FACHRUZI JUAN SYAHPUTRA

NIM. 11775102513

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FACHRUZI JUAN SYAHPUTRA
 NIM : 11775102513
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di
 Desa Sei Beheras Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya
 Kabupaten Indragiri Hulu

DISETUJUI OLEH :
 DOSEN PEMBIMBING

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

MENGETAHUI :

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fachruzi Juan Syahputra
 Nim : 11775102513
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara Fakultas
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa
 Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten
 Indragiri Hulu
 Tanggal Ujian : Rabu, 29 September 2021

Disahkan Oleh :
KETUA PENGUJI

Dr. Ihon Afrizal, S.HI, MA
 NIP. 1979 0911 201101 1 003

PENGUJI I

Mashuri MA
 NIP. 1977 0721 201411 1 002

PENGUJI II

Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
DESA SEI BEBERAS HILIR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh:

FACHRUZI JUAN SYAHPUTRA
NIM.11775102513

Penelitian ini dilakukan di desa sei beberas hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten Indragiri hulu. Peneliti menemukan bahwa terdapat permasalahan di pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terjadi pada tahun 2017,2018,dan 2019. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017,2018 ,dan 2019 pada desa sei beberas hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten Indragiri hulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di desa Sei beberas hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu dan (2) Faktor apa yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di Desa Sei beberas hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 11 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa sei beberas hilir belum di laksanakan dengan baik terlihat dari beberapa indicator-indikator yang menjadi ukuran dalam penelitian ,dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pembangunan Infrastruktur

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan-Nya dan utusan-Nya yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam maka di dapat pahala disisinya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelarkan permadan keislaman bagi umat manusia di muka bumi terutama bagi penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu”**. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan syarif khasim.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Kasih sayang dan penghormatan yang tak terkira kepada kedua orang tua saya ibunda Maimunah zubir dan ayahanda Ismed munir yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan pelajaran hidup yang begitu besar untuk saya. Dan juga kepada kakak tercinta Amelia puspita sari dan Indah nurmita sari yang telah memberikan dukungan moril dan material selama masa studi.

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Orangtua yang tercinta ,yaitu mama dan papa ,semoga kalian di ampuni dosa nya oleh Allah ta'ala dan di sayangi olehNya.
2. Kepada kedua saudari yang bernama kak imel dan kak indah ,dan juga abang ipar yang selalu mensupport dan memabantu terhadap skripsi ini ,kemudian untuk seluruh keluarga di padang dan manapun.
3. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim , Prof. Dr.Khairunnas Rajab, M.Ag.
4. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial, Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM. beserta seluruh staf administrasi
5. Bapak Dr.Khairunsyah Purba, S.Sos., M. Si. selaku ketua Prodi Adminstrasi Negara yang telah meluangkan waktu demi membimbing saya selama menjalani studidi prodi Administrasi Negara Uin Suska.
6. Ibu Ratna Dewi, S.Sos., M. Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu demi membantu, membimbing, serta memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
7. Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag. selaku ketua Komite Kode Etik dan Pembinaan keagamaan mahasiswa fakultas ekonmi dan ilmu sosial yang senantiasa membimbing mahasiswa pada keagamaan dengan wewenangnya .
8. Para dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah meberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Desa dan beserta staff yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.

10. Kepada semua teman-teman Administrasi Negara khususnya angkatan 2017 serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Akhir kata penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Adminstrasi Negara .

Pekanbaru , 20 September 2021

Penulis

FACHRUZI JUAN SYAHPUTRA

Nim :11775102513

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan manfaat penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Implementasi.....	13
2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	14
2.3 Pembangunan	20
2.4 Pembangunan Nasional	21
2.5 Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	24
2.6 Tiga Sasaran Pembangunan	26
2.7 Prinsip Pembangunan Infrastruktur Desa.....	27
2.8 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Desa.....	28
2.9 Ruang lingkup program perencanaan pembangunan infrastruktur	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Pola pelaksanaan program pembangunan infrastruktur	28
2.11 Jenis Infrastruktur Pedesaan	29
2.12 Kriteria Infratraktur	29
2.13 Permasalahan Pembangunan Desa.....	30
2.14 Konsep Pembangunan Menurut Pandangan Islam	31
2.15 Implikasi Sebuah Kebijakan	36
2.16 Penelitian Terdahulu	37
2.17 Konsep Operasional	38
2.18 Kerangka Berpikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.1.1 Lokasi Penelitian	40
3.1.2 Waktu Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.3.1 Jenis Data	41
3.3.2 Sumber Data.....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data	42
3.5 Informan Penelitian	43
3.6 Teknik Analisa Data	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Sejarah Desa Sei Beberas Hilir	44
4.2 Letak Luas dan Batas Desa Sei Beberas Hilir	46
4.3 Kependudukan	47
4.4 Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Desa	47
4.5 Pemerintahan	50
4.5.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi Kepala Desa	50
4.6 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sei Beberas Hilir	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	55
5.1.1 Komunikasi	56
5.1.2 Sumber Daya	64
5.1.3 Disposisi	76
5.1.4 Struktur Birokrasi	79
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

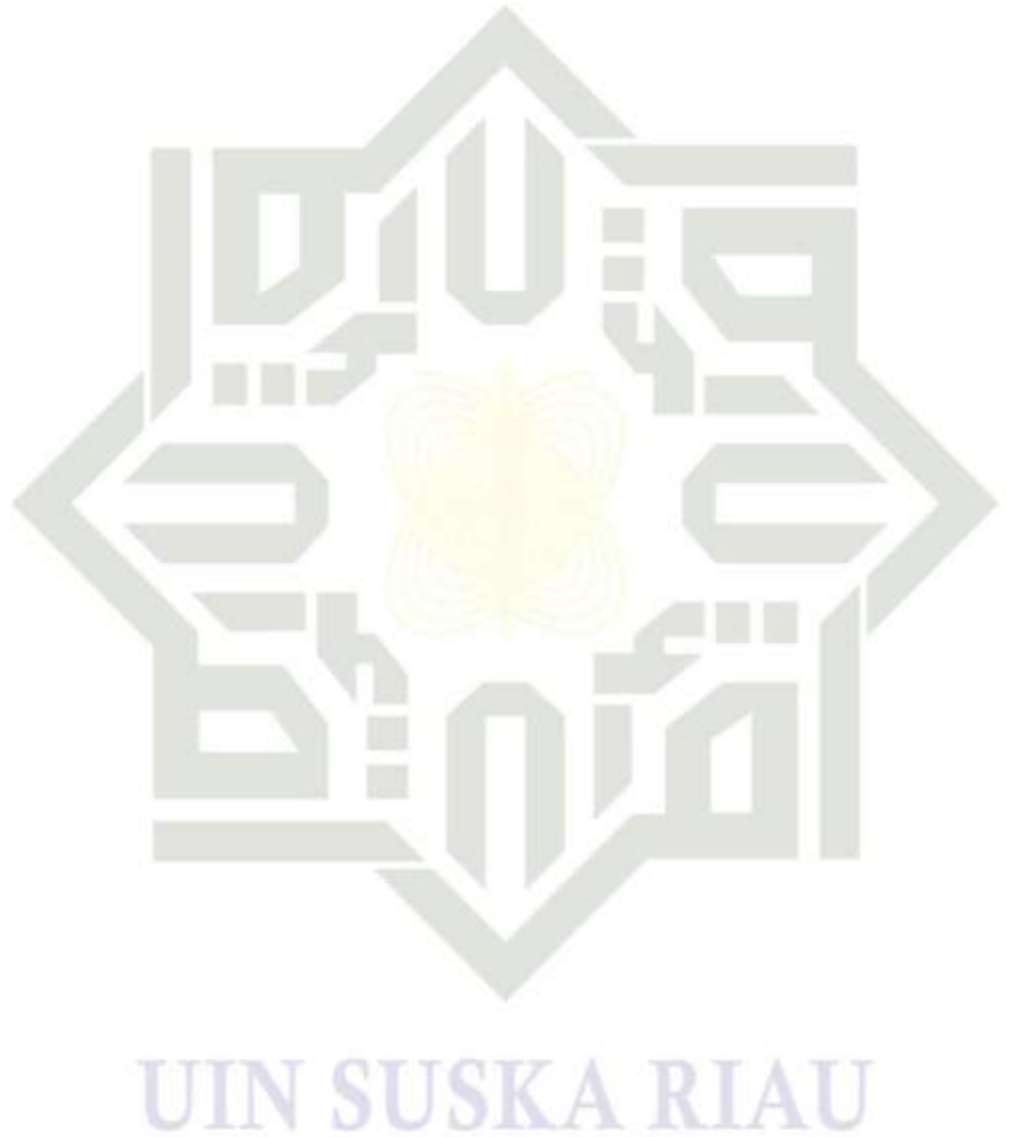
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa Tahun 2017 - 2020	4
Tabel 1.2 Daftar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017	5
Tabel 1.3 Daftar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018.....	6
Tabel 1.4 Daftar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019.....	8
Tabel 2.1 Konsep Operasional.....	38
Tabel 3.1 Informan Penelitian	44
Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sei beberas hilir.....	47
Tabel 4.2 Sarana dan prasarana pada kantor kepala Desa Sei beberas hilir	48
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Sei beberas hilir(2019-2024).....	53
Tabel 5.1 Sumber daya Manusia pembangunan Infrastruktur	65
Tabel 5.2 Dana Desa Tahun 2017 - 2020	67
Tabel 5.3 Daftar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017.....	67
Tabel 5.4 Daftar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018.....	70
Tabel 5.5 Daftar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 5.1 Papan Infomasi Pelaksanaan kegiatan Pembangunan	58



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan sangat jauh dari hal pembangunan yang layak. Pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana yang dapat mencakup ekonomi, sosial, politik, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya..

Pada saat sebelum era reformasi pembangunan desa cenderung bersifat sentralistik atau dikenal dengan istilah top-down development program. Tipe ini mengarahkan bahwa pembangunan desa lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pembangunan desa pada era sebelum reformasi baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Selanjutnya setelah era reformasi dimulai pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Konsep ini dikenal dengan nama bottom-up development program. Pada periode tahun 2015-2019 pembangunan perdesaan diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

Wewenang yang telah di serah alihkan oleh Pemerintah pusat kepada Desa terhadap berbagai aspek kehidupan dalam mencakup kegiatan sosial dan ekonomi ,maka tentunya Pemerintah Desa selaku penyelenggara kegiatan tersebut harus dapat memiliki kapabilitas dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan yang dimaksud ,seperti Pembangunan ,Pemberdayaan ,Pembinaan, dan juga penyelenggaraan pemeritahan desa.

Salah satu dari wewenang Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya ialah Pembangunan , **Menurut arief budiman (2000)** menjelaskan bahwasanya pembangunan merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan juga merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan bertujuan dalam mempermudah segala kegiatan yang dilakukan masyarakat dan juga dapat menaikkan taraf hidup dengan cara dalam menyediakan sarana dan prasarana yang berkondisi optimal dan baik ,tentunya hal tersebut telah terlebih dahulu direncanakan untuk di bangun .yang dimaksud dari hal itu semua ialah Infrastruktur. Infrastruktur dapat diartikan sebagai semua ragam fasilitas yang dibutuhkan khalayak umum guna mendukung kegiatan dan kehidupan kesehariannya. Infrastruktur juga dapat disimpulkan sebagai segala fasilitas, termasuk dalam bentuk fisik dan non-fisik yang dibangun pemerintah atau pun perorangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam ruang lingkupnya yang meliputi sektor dan aspek sosial-ekonomi. Menurut **Robert J. Kodoatie (2005)**, pengertian infrastruktur adalah suatu sistem yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional . Pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Strategi ini pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa pada masa krisis tahun 1930-an. Atau, contoh kasus China yang saat ini melakukan kombinasi strategi kebijakan pengembangan infrastruktur, yang dipadukan dengan strategi daya saing ekspor. Jadi, tidak salah jika pemerintah menggiatkan perhatian publik terhadap infrastruktur, sekaligus melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur. Namun, masalahnya adalah apakah implementasi strategi dan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif di lapangan.

Bagi pemerintah pusat maupun Daerah, infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping Pendidikan dan Kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor sehingga infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah dipandang penting untuk dapat mengedepankan konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur Indonesia yang berkeadilan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sei Beberas Hilir tentunya membutuhkan Dana untuk terlaksananya pembangunan yang telah direncanakan, adapun Total Dana Desa Sei Beberas Hilir pada tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1: Total Keseluruhan Dana Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Dari Tahun 2017 – 2019

No	Tahun Anggaran	Total
1.	2017	<i>Rp. 1.242.829.010</i>
2.	2018	<i>Rp. 1.219.879.907</i>
3.	2019	<i>Rp. 1.503.949.677</i>

Sumber: Kantor Desa Sei Beberas Hilir tahun 2021

Dilihat dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa Dana yang dimiliki Desa Sei Beberas Hilir cukup banyak dimulai dari tahun Anggaran 2017 yang berkisar 1,2 milyar ,kemudian pada tahun 2018 berkisar 1,2 milyar ,dan yang terakhir yaitu pada tahun anggaran 2019 yang berkisar 1,5 milyar ,hal ini tentu menjadi wewenang Desa dalam mengelola Dana tersebut untuk dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah terencanakan. berdasarkan Pepres No.60 tahun 2014 bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara(APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyusunannya rencana pengembangan dan pembangunan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk pertuaran menteri dalam negeri No.66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana pengembangan desa yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa yang tangguh. Dan Dibawah ini dapat dilihat Daftar perencanaan pembangunan infrastruktur pada Desa Sei Beberas Hilir dari tahun 2017-2019 baik yang terrealisasikan maupun belum terealisasi, sebagai berikut:

Tabel 1.2: Daftar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Desa sei beberas hilir Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Jumlah anggaran /Volume	Terelisasi/Volume	Belum Terealisasi /Volume
1.	Semenisasi	Rp. 650.000.000 / 2500m	Rp. 184,886,000 / 660m	Rp. 465,114,000 / 1840m
2.	Box Culvert	Rp. 162,212,000 / 423,5 M	Rp. 162,212,000 / 423,5m	-
3.	Pembangunan Gorong-Gorong	Rp.31,481,000 /P: 7 M ,D: 100 Cm (3 Titik)	Rp.31,481,000 /P: 7 M ,D: 100 Cm (3 Titik)	-
4.	Pengaspalan Jl.Narasinga	Rp. 1,000,000,000 / 500 M	-	Rp. 1,000,000,000 / 500 M
5.	Penambahan Tiang Listrik	Rp. 80 Jt / 50 Batang	-	Rp. 80 Jt / 50 Batang
6.	Pencucian Parit	Rp. 100 Jt / 2000 M	-	Rp. 100 Jt / 2000 M
7.	Paving Block Masjid	Rp. 45 Jt/ 500 M3	-	Rp. 45 Jt/ 500 M3
8.	Pembangunan Rumah Layak	Rp. 350 Jt / 5 Unit	-	Rp. 350 Jt / 5 Unit
9.	Paving Block PDTA	Rp. 45 Jt /430 M3	-	Rp. 45 Jt /430 M3
10.	Pemasangan Lampu	Rp. 12,500,000 / 25 Titik	-	Rp. 12,500,000 / 25 Titik
11.	Pembukaan	Rp. 100 Jt / 2500	-	Rp. 100 Jt / 2500



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Jalan Baru	M		M
12	Pembangunan Pagar Masjid	Rp. 105.000.000 / 300 M	-	Rp. 105.000.000 / 300 M
13	Pengaspalan Jalan Jalur	Rp. 500 Jt / 500 M	-	Rp. 500 Jt / 500 M
14	Pembangunan Gedung Serba Guna	Rp. 700 Jt / 1 Unit	-	Rp. 700 Jt / 1 Unit
15	Pembangunan Kantor UED SP	Rp. 70 Jt / 1 Unit	-	Rp. 70 Jt / 1 Unit
16	Pembuatan Paving Block Hal. Kantor Desa	Rp. 100 Jt / 1 Paket	-	Rp. 100 Jt / 1 Paket
17	Pembuatan Pagar Jalur	Rp. 600 Jt / 2 Jalur	-	Rp. 600 Jt / 2 Jalur
18.	Pembuatan Drainse Keliling Lap.Bola	Rp. 250 Jt / 1 Paket	-	Rp. 250 Jt / 1 Paket
19.	Pembuatan Cucian Kendaraan	Rp. 100 Jt/ 1 Unit	-	Rp. 100 Jt/ 1 Unit
20.	Pembuatan Pagar Dan Paving Block Kantor Desa	Rp. 400 Jt / 1 Paket	-	Rp. 400 Jt / 1 Paket
21	Pembangunan Tribun Mini Lap.Sepakbola	Rp. 150 Jt / 1 Unit	-	Rp. 150 Jt / 1 Unit
	Jumlah	Rp 6.301.193.000	Rp 378.579.000	Rp. 5.922.614.000

Sumber: Kantor Desa Sei beberas hilir 2021

Tabel 1.3: Daftar Perencanaann Pembangunan Infrastruktur Pada Desa sei beberas hilir Tahun 2018

No	Jenis Kegiatan	Jumlah anggaran /Volume	Terelisasi/Volume	Belum Terealisasi/ Volume
1	Rehab Jalan Desa	Rp. 90,890,000 / 4 X 0,15 X 550 M	Rp. 90.890.000 / 4 X 0,15 X 550 M	-
2	Pembangunan GOR Lapangan	Rp. 750,000,000 / 20 X 25 X 10 M	Rp. 583.561.000 / 18 X 30 X 10 M	-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Futsal			
3	Pengaspalan Jalan Jalur	Rp. 500 Jt / 500 M	-	Rp. 500 Jt / 500 M
4	Pembangunan Gedung Serba Guna	Rp. 700 Jt / 1 Unit	-	Rp. 700 Jt / 1 Unit
5	Pembangunan Kantor UED SP	Rp. 70 Jt / 1 Unit	-	Rp. 70 Jt / 1 Unit
6	Pembuatan Paving Block Hal. Kantor Desa	Rp. 100 Jt / 1 Paket	-	Rp. 100 Jt / 1 Paket
7	Pembuatan Pagar Jalur	Rp. 600 Jt / 2 Jalur	-	Rp. 600 Jt / 2 Jalur
8	Pembuatan Drainase Keliling Lap.Bola	Rp. 250 Jt / 1 Paket	-	Rp. 250 Jt / 1 Paket
9	Pembuatan Cucian Kendaraan	Rp. 100 Jt/ 1 Unit	-	Rp. 100 Jt/ 1 Unit
10	Pembuatan Pagar Dan Paving Block Kantor Desa	Rp. 400 Jt / 1 Paket	-	Rp. 400 Jt / 1 Paket
11	Pembangunan Tribun Mini Lap.Sepakbola	Rp. 150 Jt / 1 Unit	-	Rp. 150 Jt / 1 Unit
12	Pengaspalan Jl.Narasinga	Rp. 1,000,000,000 / 500 M	-	Rp. 1,000,000,000 / 500 M
13	Penambahan Tiang Listrik	Rp. 80 Jt / 50 Batang	-	Rp. 80 Jt / 50 Batang
14	Pencucian Parit	Rp. 100 Jt / 2000 M	-	Rp. 100 Jt / 2000 M
15	Paving Block Masjid	Rp. 45 Jt/ 500 M3	-	Rp. 45 Jt/ 500 M3
16	Pembangunan Rumah Layak	Rp. 350 Jt / 5 Unit	-	Rp. 350 Jt / 5 Unit
17	Paving Block PDTA	Rp. 45 Jt /430 M3	-	Rp. 45 Jt /430 M3
18	Pemasangan Lampu	Rp. 12,500,000 / 25 Titik	-	Rp. 12,500,000 / 25 Titik
19	Pembukaan	Rp. 100 Jt / 2500	-	Rp. 100 Jt / 2500

	Jalan Baru	M		M
20.	Pembangunan Pagar Masjid	Rp. 105.000.000 / 300 M	-	Rp. 105.000.000 / 300 M
	Jumlah	Rp 6.116.589.000	Rp. 674.451.000	Rp. 5.357.500.000

Sumber: Desa Sei beberas hilir 2021

Tabel 1.4: Daftar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Desa sei beberas hilir Tahun 2019

No	Jenis kegiatan	Jumlah anggaran / volume	Terelisasi / volume	Belum terealisasi / volume
1.	Semenisasi	Rp. 650 jt / 2500 m	Rp. 572.201.590 / 1764 m	Rp. 77.798,410 / 736 m
2.	Rehab jalan peningkatan badan jalan	Rp. 116,313,410 / 550 x 5 x 0,15 m	Rp. 116.313.410 / 550 x 5 x 0,15 m	-
3.	Pengaspalan Jalan Jalur	Rp. 500 Jt / 500 M	-	Rp. 500 Jt / 500 M
4.	Pembangunan Gedung Serba Guna	Rp. 700 Jt / 1 Unit	-	Rp. 700 Jt / 1 Unit
5.	Pembangunan Kantor UED SP	Rp. 70 Jt / 1 Unit	-	Rp. 70 Jt / 1 Unit
6.	Pembuatan Paving Block Hal. Kantor Desa	Rp. 100 Jt / 1 Paket	-	Rp. 100 Jt / 1 Paket
7.	Pembuatan Pagar Jalur	Rp. 600 Jt / 2 Jalur	-	Rp. 600 Jt / 2 Jalur
8.	Pembuatan Drainse Keliling Lap.Bola	Rp. 250 Jt / 1 Paket	-	Rp. 250 Jt / 1 Paket
9.	Pembuatan Cucian Kendaraan	Rp. 100 Jt / 1 Unit	-	Rp. 100 Jt / 1 Unit
10.	Pembuatan Pagar Dan Paving Block Kantor Desa	Rp. 400 Jt / 1 Paket	-	Rp. 400 Jt / 1 Paket
11.	Pembangunan Tribun Mini Lap.Sepakbola	Rp. 150 Jt / 1 Unit	-	Rp. 150 Jt / 1 Unit
12.	Pengaspalan	Rp.	-	Rp. 4,000,000,000 /

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Jl.Narasinga	4,000,000,000 / 1500 M		1500 M
13.	Penambahan Tiang Listrik	Rp. 80 Jt / 50 Batang	-	Rp. 80 Jt / 50 Batang
14.	Pencucian Parit	Rp. 100 Jt / 2000 M	-	Rp. 100 Jt / 2000 M
15.	Paving Block Masjid	Rp. 45 Jt/ 500 M3	-	Rp. 45 Jt/ 500 M3
16.	Pembangunan Rumah Layak	Rp. 350 Jt / 5 Unit	-	Rp. 350 Jt / 5 Unit
17.	Paving Block PDTA	Rp. 45 Jt /430 M3	-	Rp. 45 Jt /430 M3
18.	Pemasangan Lampu	Rp. 12,500,000 / 25 Titik	-	Rp. 12,500,000 / 25 Titik
19.	Pembukaan Jalan Baru	Rp. 100 Jt / 2500 M	-	Rp. 100 Jt / 2500 M
20.	Pembangunan Pagar Masjid	Rp. 105.000.000 / 300 M	-	Rp. 105.000.000 / 300 M
	Jumlah	Rp. 8.473.813.410	Rp. 688,515,000	Rp. 7,785,298,410

Sumber: Kantor Desa Sei beberas hilir 2021

Berdasarkan table diatas pada daftar Perencanaan pembangunan Infrastruktur pada tahun 2017 terdapat 21 perencanaan pembangunan infrastruktur yang kemudian hanya 3 jenis kegiatan pembangunan yang terealisasi ,dan tahun 2018 terdapat 20 Perencanaan pembangunan infrastruktur yang kemudian hanya 2 jenis kegiatan pembangunan yang di realisasikan ,dan terakhir pada tahun 2019 terdapat 20 Perencanaan pembangunan infrastruktur yang kemudian hanya 2 jenis kegiatan pembangunan yang dapat di realisasikan . Hal itu juga bersangkut paut terhadap Pemerintahan desa yang menyelenggarakan kegiatan dan juga beberapa tokoh masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam pembuatan pengusulan perencanaan pembangunan infrastruktur pada desa sei beberasi hilir.

Penulis Menemukan permasalahan pada Desa Sei Beberas Hilir yaitu terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak banyak melakukan pembangunan infrastruktur di 3 tahun tersebut yaitu pada tahun 2017,2018 dan 2019 bila dibandingkan dengan sumber dana desa yang di terima dan RKPdesa yang cukup banyak perencanaanya . Dari observasi dan mengambil data sekunder yang penulis dapati dilapangan, penulis berkeinginan meleliti sejauh mana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang berbentuk Skripsi dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu?
2. Faktor apa yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu.

2. Manfaat

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan yaitu sebagai berikut :

Penelitian ini bisa bermanfaat sebagai salah satu acuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pada Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu dan memberikan manfaat tersendiri bagi penulis pada masa yang akan mendatang dan dapat menambah wawasan penulis terkait masalah yang diangkat yaitu pelaksanaan program infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disajikan dalam enam bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, penelitian terdahulu, defenisi konsep, dan konsep operasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yaitu : mengenai lokasi dan waktu penelitian ,jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah objek penelitian dan lainnya.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB VI PENUTUP

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis menyajiakn kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian implementasi

implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (*dasein and dasollen*). Hal ini dengan pandangan Van Meter dan Horn. (Grendle) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Sering di jumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilakukan.

Syukur dalam **Surmayadi (2005 : 79)** mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan (3) ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peningkatan(3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut *street level bureaucrats* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru di kelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1.) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3.) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

2.) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4.) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa:

Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari Struktur birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), ”*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan.”

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

“SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.”

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:

“struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

2.2 Pembangunan

Menurut arief budiman (2000) menjelaskan bahwasanya pembangunan merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan seara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan.

Dengan tujuan semua turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatukomponen esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan financial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensiaonal yang melibatkan reorganisasi dan reorentasi dari semua system ekonomi dan sosial (Todaro, 1987;63)

2.3 Pembangunan Nasional

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional memberi acuan dalam merencanakan pembangunan daerah sebagai berikut:

Pasal 3

A. Perencanaan pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara republik indonesia.

B. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementrian/ lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

C. Perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud ayat 2 menghasilkan;

- a. Rencana pembangunan jangka panjang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Rencana pembangunan jangka menengah
- c. Rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

- A. RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
- B. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan Umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga kewilayaan dan lintas kewilayaan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- C. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fisik, serta program kementerian/lembaga, listas kementerian/lembaga, kewilayaan berbentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5

- A. RPJP daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- B. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJP nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- C. RKPd merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Pasal 6

- A. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJP nasional dan bersifat indikatif.
- B. Renja KL disusun dengan berpedoman pada renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan bersifat indikatif, serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- A. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

4. Renja-SKPD disusun dengan berpedomana kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2.4 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam penyusunannya rencana pengembangan dan pembanguan desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk pertuaran menteri dalam negeri No.66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Pedoman ini mencoba memberikan panduan dalam penyusunan rencana pengembangan desa yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah desa yang tangguh.

Dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud bahwa;

- A. Desa atau yang dimaksud dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia.
- B. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- C. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersama kepala desa

D. Pengeloaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawaasan keuangan daerah.

E. Anggaran pendapatan belanja negara yang selanjutnya disingkat (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dana APBN bisa berbentuk dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

F. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayaan disertai dengan rencana kerja.

G. Rencan kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencannaan untuk periode 1 tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJM-Desa.

H. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usuan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (propinsi, kabupaten/kota), APB desa swadaya dan kerjasama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pihak ketiga.

I. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah berakar budaya di wilayah Indonesia.

J. Profil desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

K. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipasi oleh para pemangku kepentingan desa (pihak kepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkenadampak hasil musyawarah) untuk menyetujui rencana kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan.

L. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

M. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Langkah-langkah perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dalam peraturan menteri dalam negeri no.66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yaitu meliputi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan evaluasi pembangunan hal ini juga ter tuang dalam PP No.72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No.73 tahun 2005 tentang kelurahan.

2.5 Tiga Sasaran Pembangunan

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan, baik secara fisik, maupun non fisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses social, ekonomidan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, tetapi pembangunan dalam semua masyarakat haruslah mempunyai, paling sedikit tiga sasaran sebagai berikut (Michael P.Todaro:1977)

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/ pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan , kesehatan dan perlindungan.
- b. Mengangkat taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi dan bukan untuk memenuhi kebutuhan materil, tapi juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri, baik itu secara individu maupun nasional.
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua bagi seluruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan juga negara-negara lain tapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

2.6 Prinsip Pembangunan Infrastruktur Desa

Adapun prinsip perencanaan pembanguan infrastruktur meliputi diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat.
- b. Dilaksanakan masyarakat secara terbuka
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat sevar berkelanjutan

2.7 Pendekatan Perencanaan Pembangunan Desa

Ada beberapa pendekatan perencanaan pembangunan infrastruktur yang harus dilaksankn oleh masyarakat dan pemerintah setempat diantaranya:

- A. Pemerdayaan
- B. Keberpihakkan kepada yang miskin
- C. Otonomi dan desentralisasi
- D. Partisipatif
- E. Keswadayaan
- F. Keterpaduan program pembangunan
- G. Penguatan kapasitas kelembagan

2.8 Ruang lingkup program perencanan pembangunan infrastruktur

Ruang lingkup program pembangunan perencanaan pembangunan infrastruktur diantara nya:

- A. Pembangunan infrastruktur trnsportasi perdesaan untuk mendukung peningkatan aksebilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan perdesaan, titian.
- B. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu: irigasi perdesaan.
- C. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan.

2.9 Pola pelaksanaan program pembangunan infrastruktur

Infrastruktur perdesaan didefenisikan sebagai infrastruktur yang bersifat dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A,2005).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola pelaksanaan program perencanaan pembangunan infrastruktur diantaranya:

- a. Program ini dilaksanakan oleh masyarakat desa sasaran secara swakelola melalui organisasi masyarakat setempat sebagai pengelol kegiatan.
- b. Penetapan jenis infrastruktur, perencanaan dan operasi pemeliharannya dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam musyawarah desa.
- c. Selama pelaksanaan ditingkat desa dilakukan pendampingan oleh fasilitator (konsultan)

2.10 Jenis Infrastruktur pedesaan

Jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi cakupan pembiayaan PPIP untuk tahun anggaran 2009, antara lain berupa

- a. Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, berupa jalan dan jembatan pedesaan,
- b. Infrastruktur yang mendukung produksi pangan, berupa irigasi pedesaan,
- c. Infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, berupa penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan (pedoman PPIP, 2006) .

2.11 Kriteria Infrastruktur

Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran PPIP 2009, harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:

- a. yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa,
- b. langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin
- c. penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat
- d. dapat dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran 2009,



e. memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal.

2.12 Permasalahan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan suatu bentuk intervensi kelembagaan publik. Diperlukannya suatu intervensi public didasari oleh pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat optimal dicapai akibat terjadinya kegagalan pasar akibatnya mekanisme pasar berlangsung secara tidak sempurna. Fenomena market failure dapat tumbuh sebagai akibat sistem ekonomi yang tidak dapat menyediakan produk-produk yang diperlukan atau akibat kegagalan alokasi sumberdaya. Market failure akan terjadi manakal berbagi eksternalitas negatif gagal direfleksikan dalam harga pasar, atau akibat adanya praktek monopoli-oligopoli, atau juga akibat kegagalan pemerintah. Secara teoritis, kegagalan pasar akan selalu muncul manakala kompetisi sempurna tidak terjadi. Kegagalan pasar dapat menyebabkan kemunduran (berdampak negatif) bagi seluruh pelaku ekonomi.

Pemerintahan adalah suatu bentuk kelembagaan yang memiliki kewenangan atau hak legal sebagai perencanaan dan pelaksanaan kepentingan-kepentingan publik. Sebagai lembaga yang memiliki legalitas, lembaga pemerintah memiliki kewenangan didalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik sebagai terjemahan dari kepentingan publik. Perlunya lembaga publik juga didasari pemahaman bahwa beberapa bentuk fasilitas diyakini hanya dapat berfungsi dengan optimal jika diserahkan pada kelembagaan publik untuk menyediakannya. Kelembagaan pemerintahan dibangun secara berhirarki dengan otoritas yang berbeda. Lembaga pemerintahan berskala nasional menangani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berskala nasional, sedangkan pemerintahan daerah memiliki keenangan berskala daerah.

Bukti empiris menunjukkan telah terjadinya kegagalan pemerintah untuk berperan sebagaimana mestinya. Government failure timbul karena lembaga pemerintah yang eksistensinya dilandasi untuk mengelimir market failure, ternyata menimbulkan masalah-masalah baru. Individu-individu dan kelompok-kelompok didalam lembaga pemerintah banyak yang ternyata berperilaku seperti individu-individu atau lembaga swasta pelaku ekonomi yang tidak berorientasi pada kepentingan publik tapi berorientasi pada kepentingan nya sendiri atau kelompoknya.

2.13 Konsep Pembangunan Menurut Pandangan Islam

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam al-quran dan Sunnah. Sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan dan tujuan semua level.

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai Rasullullah (Utusan Allah) dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.



Permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan juga di Jelaskan oleh Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat pada Al-Qur'an surat Ar-Rad ayat 11, sebagai berikut:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Qur'an Surah Ar-Rad ayat 11)

Menurut As Sa'diy, maksud firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri," adalah bahwa Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada suatu kaum, berupa kenikmatan, ihsan, dan kehidupan yang menyenangkan sampai mereka merubah keadaan diri mereka dengan berpindah dari keimanan kepada kekafiran, dari ketaatan kepada kemaksiatan, atau dari mensyukuri nikmat Allah kepada mengkufurinya, sehingga Allah mencabut kenikmatan itu dari mereka. Demikian pula, ketika manusia merubah keadaan diri mereka dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah, maka Allah akan merubah keadaan mereka dari kesengsaraan kepada kebaikan, kesenangan, kegembiraan, dan rahmat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari Ayat dan Tafsir di atas menjelaskan bahwa jika suatu kaum (Bangsa) ingin merubah nasib mereka maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa saja yang harus mereka lakukan dan berusaha dalam melaksanakannya baik itu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yaitu menempuh jalan yang halal dan thoyib serta melaksanakannya dengan tekun dan ikhlas atau suatu kaum itu ingin melakukan sebaliknya maka Allah akan menghendaki apa yang mereka ubah dari diri mereka sendiri. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan, serta manusia memiliki kuasa sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dan menjalankan tugas sesuai dengan keahlian/kemampuan yang dimilikinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nuur Ayat 55 adalah sebagai berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
 مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Qur'an surah An-Nur ayat 55)

Dari Tafsir Ibnu katsir ialah ini merupakan janji dari Allah Ta'ala. kepada Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Dia akan menjadikan umatnya sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dengan mereka negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka. Dan Allah Ta'ala akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Janji itu telah diberikan oleh Allah Ta'ala. kepada mereka, segala puji bagi Allah, begitu juga karuniannya. Kerena sesungguhnya sebelum Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, Allah Ta'ala telah menaklukkan baginya Mekah, Khaibar, Bahrain, dan semua kawasan Jazirah Arabia serta negeri Yaman seluruhnya. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. sempat memungut jizyah dari orang-orang Majusi Hajar dan juga dari para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk yang ada di pinggiran negeri Syam (yang berada di dekat negeri Arab).

Dari Ayat dan tafsir di atas menjelaskan konsep yang sangat membantu bagi umat manusia terutama pada umat islam yaitu bagaimana cara mendapatkan hidup di dunia dengan aman sentosa bahkan hingga dapat berkuasa di muka bumi ini, caranya tidak lain ialah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mempersekutukanNya kemudian Meyakini Nabi Muhammad ialah utusan-Nya dan terkahir ialah Beramal Shaleh, akan tetapi dalam Mengerjakan amal Shaleh tentunya harus berpedoman kepada Kitabullah dan Assunnah ,lain dari itu semua maka bisa menyebabkan kesesatan dan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla seperti dilarangnya berbuat Syirik atau mempersekutukan Allah dalam Beribadah dan Memintak ,dan juga dilarang berbuat mengada-ngada dalam perkara Ibadah seperti menambah-nambah ibadah yang sebenarnya telah Sempurna ,karna islam telah sempurna sebelum Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Wafat. maka atas izin Allah Ta’ala membuat kita dalam keadaan aman dan berkuasa di dunia ,termasuk dengan kaitannya dalam aspek manapun termasuk aspek pembangunan.

Akan tetapi dalam Mengerjakan amal Shaleh tentunya harus berpedoman kepada Kitabullah dan Assunnah ,lain dari itu semua maka bisa menyebabkan kesesatan dan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla seperti dilarangnya berbuat Syirik atau mempersekutukan Allah dalam Beribadah dan Memintak ,dan juga dilarang berbuat mengada-ngada dalam perkara Ibadah seperti menambah-nambah ibadah yang sebenarnya telah Sempurna ,karna islam telah sempurna sebelum Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Wafat.

Kemudian Pembangunan dalam islam hendaklah dijalankan dua tahap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

,yaitu:

1. Tahapan pembangunan kerohanian
 - a. Tahapan pembangunan paling asas dalam Islam.
 - b. Akal dan jiwa manusia perlu dibangun terlebih dahulu.
 - c. Tumpuan utama pendekatan islam adalah keatas kejiwaan, moral dan etika-etika pembangunan.
2. Tahapan pembangunan fisikal
 - a. Pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya.
 - b. Pembangunan yang berdampak pada kemaslahatan orang banyak .

Pembangunan yang disyariatkan dalam islam adalah pembangunan yang:

- a. Membawa kebaikan secara keseluruhan manusia
- b. Halal
- c. Mengikuti keperluan
- d. Bukan untuk kebanggaan
- e. Keuntungan semua pihak

Pembangunan yang diharamkan dalam islam:

- a. Pembangunan yang mendatangkan kesusahan kepada manusia,
- b. Pembangunan yang berasaskan kepada kebendaan semata-mata yang ada di haramkan oleh Allah Azza wa Jalla,

contohnya:

- a. Pembangunan menyebabkan kezaliman kepada manusia
- b. Pembangunan mengancam kesejahteraan sejagat
- c. Menjadikan manusia lupa tanggungjawab sebagai khalifah Allah
- d. Membina rumah judi, pelacuran, hiburan dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Implikasi Sebuah Kebijakan

Dalam diskusi ada kesamaan dalam hal ide keseimbangan itu harus dipelihara dan diatur antara aktivitas ekonomi dengan sumberdaya alam. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah laju pertumbuhan populasi berbanding terbalik dengan keadaan lingkungan. Kebijakan yang diambil saat ini adalah mengurangi tingkat kehamilan dan tingkat kematian bayi.

Menurut Izyani tidak hanya itu saja tapi juga harus meningkatkan kualitas taraf hidup. Ini semua dapat dicapai dengan memusatkan perhatiannya pada issue-issue pertanahan dan ketiadaan akses pada fasilitas kesehatan. Idealnya adalah memberikan pendidikan public dan memasukkan nilai-nilai islam pada mereka bahwa kekayaan dan materialisme bukanlah tujuan hidup didunia ini. Meskipun sulit dilakukan karena kita hidup pada dunia yang didominasi oleh kapitalisme.

2.15 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian sebelumnya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Murba tentang studi implementasi program pembangunan infrastruktur di desa erecinnong kecamatan Bontocani kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan ,2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat dan faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong yaitu 1) keterbatasan anggaran. 2) Tidak terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

manfaat dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah sehingga kondisinya cepat rusak.

2. Penelitian oleh kamirudin tentang Analisis program pembangunan infrastruktur di desa Gobah kecamatan tambang kabupaten kampar, 2014.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten kampar Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah. Hasil dari penelitian tersebut bahwa terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa analisis program pembangunan infrastruktur di desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terlaksana dalam kategori baik dengan persentase 62,95%

2.16 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberitaukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (singarimbus : 1995). Konsep operasional berisi tentang indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel. Yang menjadi variabel dalam penelitian pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.1 Konsep Operasional variabel penelitian tentang pelaksanaan pemabangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk batu jaya Kabupaten Indragiri hulu

Variabel	Indikator	Sub Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Transmisi
		<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur

		<ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya anggaran
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya peralatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Submber daya kewenangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan Birokrasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Insentif
	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Standard Operational Procedure (SOP)
		<ul style="list-style-type: none"> • Fragmentasi

Sumber: teori George C. Edward (faktor yang mempengaruhi implemntasi)

2.17 Kerangka Berpikir

Menurut Polancik (2009) kerangka berfikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Polancik menempatkan hal ini untuk kepentingan penelitian. Dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

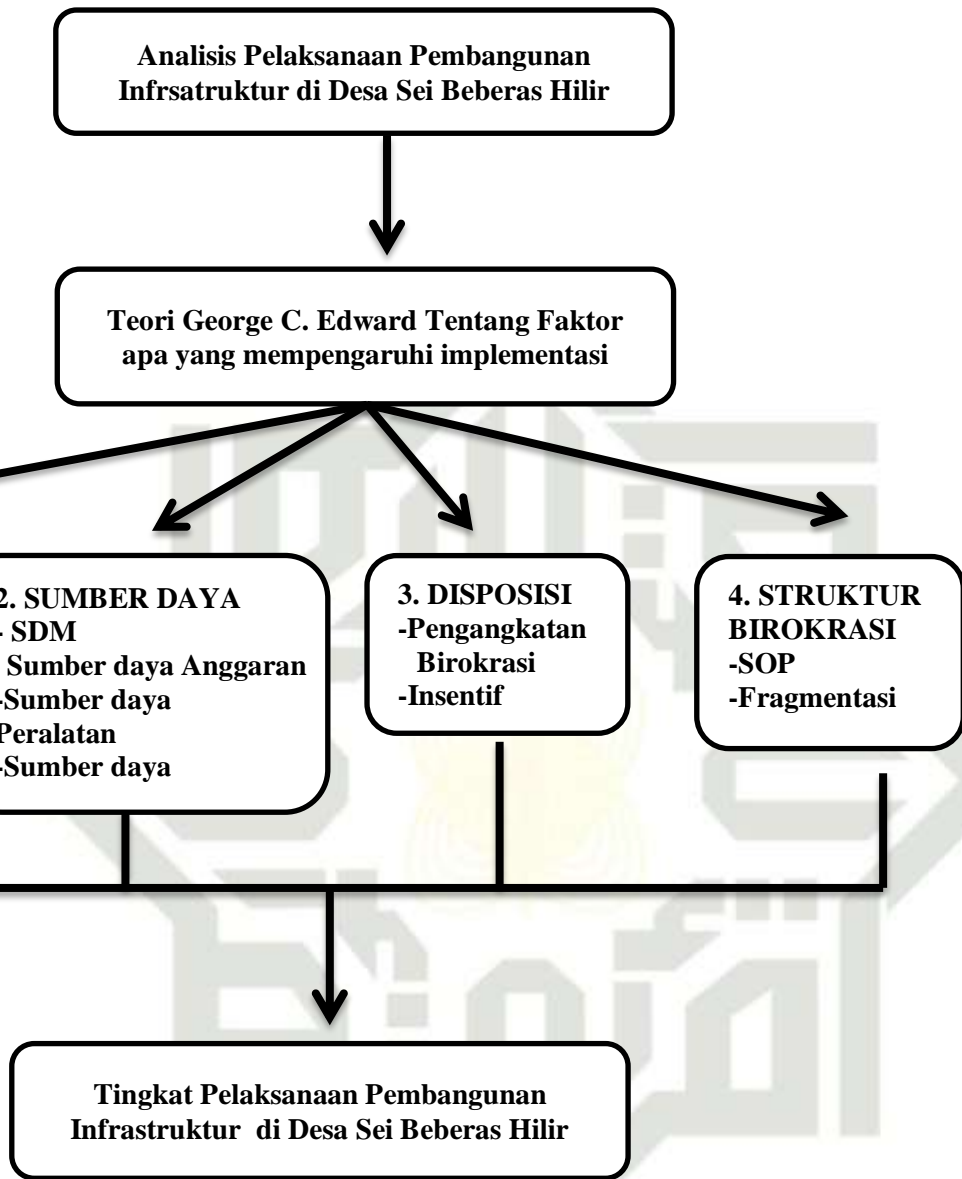
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Desa Sei Beberas Hilir ,Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu.

3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 Bulan ,yakni dari Mei 2021 sampai Agustus 2021.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Tylor dalam buku Lexy J. Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap berbagai masalah dalam masyarakat dan tatacara yang berlaku serta kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, tindakan-tindakan dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape,



dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumen lainnya.

Penelitian kualitatif ini memahami peristiwa yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat, dengan metode kualitatif mampu menyajikan secara langung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, selain metode kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman. Metode diharapkan bagi pembaca dapat membaca tulisan ini seolah-olah terlibat didalamnya dan dapat mengikuti alur cerita seperti berada pada lokasi yang sesungguhnya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi dari data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian, eksplanasi ataupun deskripsi. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata. Menurut Soeratno dan Arsyad (1993), sekalipun data kualitatif tidak berbentuk angka namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan pada analisis statistik.

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara. adapun data primer yaitu data tentang pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir dikecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari pihak lain seperti dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan lainnya yang mendukung kegiatan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka penelitian ini harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara ,menurut Nurul Zuriah (2009:179) wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah pencari informasi dan sumber informasi.
3. Dokumentasi, Menurut Arikunto (2007;231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto loasi, transkrip, buku, surat kabar, majalah, arsip-arsip, notulen rapat dan sebagainya. Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. Dokumentasi yang



dilakukan seperti dokumentasi kegiatan dilapangan.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini akan memberikan keterangan untuk mendapatkan data penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Desa Sei Beberas Hilir	1 Orang
2	Sekretaris Desa Sei Beberas Hilir	1 Orang
3	Kaur Umum dan Perencanaan	1 Orang
4	Kepala Dusun	1 Orang
5	Ketua RT	1 Orang
6	Masyarakat Desa Sei Beberas Hilir	6 Orang
JUMLAH		11 Orang

Sumber: *Data Olahan Tahun 2021*

3.6 Teknik Analisa Data

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris, penelitian yang menggunakan analisa data secara deskriptif. Sehingga bisa menjelaskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisa deskriptif diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, analisa data, secara empiris dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Sei beberas hilir

Desa Sei Beberas Hilir adalah nama suatu wilayah yang berada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu ini merupakan desa baru yang mana dahulu merupakan bagian dari kecamatan Pasir Penyu. Menurut tokoh adat dan juga masyarakat yang dituakan di Desa Sei Beberas Hilir daerah ini dahulu merupakan darah peladangan yang biasa di tanam adalah padi, dan daerah ini merupakan darah subur dan banyak menghasilkan beras, demikian juga daerah ini dialiri sebuah sungai yang mana orang menyebutnya sungai beberas dalam bahasa melayu menyebutnya sei beberas aliran sungai beberas ini berada di bagian hilir, masyarakat melayu ada juga yang menyebut sungai itu dengan bahasa asli yaitu batang boboe dengan beberapa pandangan dan beberapa argumentasi maka dalam musyawarah tersebut terjadi kesepakatan untuk memberi nama desa baru di wilayah UPT pasir penyu 1 ini dengan nama desa baru yaitu Desa Sei Beberas Hilir.

Desa Sei Beberas Hilir ini mulai terbentuk mulai Tahun 1991 dengan adanya program Transmigrasi yang mana pola yang diambil adalah pola Transmigrasi Pir yang bekerjasama antara Departemen Transmigrasi dan Departemen Perkebunan yang mana perkebunan kelapa sawit waktu itu di pegang oleh PT. Inti Indosawit Subur.

Adapun penempatan penduduk diawali dengan penempatan dari penduduk setempat yang istilahnya penduduk lokal atau istilah dari Departemen

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Transmigrasi adalah APPDT (Alokasi Penduduk Daerah Transmigrasi) yang formula presentase adalah 40% dan 60% adalah masyarakat yang didatangkan dari luar Sumatera yaitu DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Angkatan militer sehingga keseluruhan masyarakat Desa Sei Beberas Hilir mencapai 296 KK (Kepala Keluarga).

Dalam penempatan transmigrasi waktu itu bernama Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) Pasir Penyus 1, yang mana waktu itu sebagai kepala UPT adalah Bapak Simbolon. Dalam pembinaan beliau sangatlah baik dalam pemerintahan maupun bidang ekonomi. Di masa pemerintahan pertama diangkatlah PJS Kepala Desa yaitu Bapak Sardjono, kemudian pada tahun 1992 masyarakat Desa Sei Beberas Hilir mendirikan Koperasi Unit Desa atau KUD yang diberi nama KUD Tani subur, dan pada tahun 1993 pendirian kelompok-kelompok tani yang berjumlah 4 kelompok tani dengan 99 jumlah anggota.

Kemudian pada tahun pertama penyerahan desa dari Deptrans ke pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu atau dengan istilah menjadi Desa Dikmitif terjadi pemilihan Kepala Desa yang mana terpilihlah Bapak Sardjono menjadi Kepala Desa yang pertama, selanjutnya pada tahun 1999 peristiwa pemilihan Kepala Desa yang pertama di desa ini yang mana masyarakat sangat antusias untuk mengikuti pesta demokrasi yang pertama di desa kita dimana waktu itu dalam pemilihan diikuti 2 (Dua) Kandidat Calon Kepala Desa yaitu

1. Bapak Sardjono
2. Bapak Darto

Dimana dalam pemilihan Kepala Desa yang pertama tersebut di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangani oleh Bapak DARTO dan memimpin Desa Sei Beberas Hilir kedepan selanjutnya komposisi perangkat desa ada mengalami perubahan berikut data perangkat desa yang di pimpin bapak DARTO. dalam kurun waktu 3 tahun kembali Desa Sei Beberas Hilir mengadakan Pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya. Dan terpilihlah Bapak Darto lagi dan pada tahun 2007 desa sungai beras hilir mengadakan pesta demokrasi untuk pemilihan Kepala Desa dan Didalam pemilihan Kepala Desa tersebut sebagai pemenang ataupun yang menjabat Kepala Desa untuk pereode selanjutnya adalah bapak SUYONO

4.2 Letak Luas Dan Batas Desa Sei Beberas Hilir

Desa Sei Beberas Hilir merupakan desa yang terletak di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Sei Beberas Hilir adalah salah satu dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Desa lain yang terdapat di Kecamatan Lubuk batu Jaya adalah Desa Rimpian, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Pondok Gelugur, Desa Sei Beberas Hilir, Desa Sei Beras-Beras, Desa Tasik Juang, Desa Pontian Mekar ,Desa Air Putih, dan Desa Kulim Jaya. Desa Sei Beberas Hilir memiliki luas wilayah 962 Ha dan luas pemukiman 182 Ha dengan batas-batas wilaayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara Kebun Plasma Desa Kulm Jaya
2. Sebelah selatan Desa Pondok gelugur
3. Sebelah timur Desa Sei Lubuk batu tinggal dan Pondok gelugur
4. Sebelah barat Desa Kulim jaya



4.3 Kependudukan

Penduduk Desa Sei Beberas Hilir berjumlah 2.006 Jiwa . Jika dilihat menurut sosial ekonomi, pada umumnya masyarakat Desa Sei Beberas Hilir bekerja sebagai petani kelapa sawit. Hal ini mengingat Desa Sei Beberas Hilir merupakan daerah transmigrasi yang sebagian besar wilayahnya ditanami kelapa sawit. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa Sei Beberas Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sei Beberas Hilir

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	247	12,91 %
2	Pedagang	30	1,57 %
3	PNS	18	0,94 %
4	Buruh Tani	124	6,48 %
5	Jasa	12	0,63 %
6	Swasta/BUMN	28	1,46 %
7	TNI/Polri	2	0,10 %
9	Karyawan	48	2,51 %
8	lainnya	1.404	73,39 %
Jumlah		1.913	100%

Sumber : Profil Desa Sei Beberas Hilir Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Desa Sei Beberas Hilir Masih didominasi oleh petani yaitu sekitar 247 orang atau 12,91% dari jumlah penduduk 1.913 jiwa. Kemudian selanjutnya adalah Buruh tani yaitu 124 orang atau 6,48%, dan yang paling rendah adalah TNI/Polri yaitu berjumlah 2 orang atau 0,10%.

4.4 Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Sei Beberas Hilir

Agar pemerintahan berjalan dengan lancar dan baik pasti memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas, agar efisien dan efektif tentu memerlukan sarana yang memadai, agar semua kegiatan tata usaha desa yang meliputi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan, pengelolaan dan pendaftaran data sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, agar dapat berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan diatas, kantor Kepala Desa sebagai pusat pemerintahan di Desa Sei Beberas Hilir, dilengkapi oleh sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Sarana dan prasarana pada kantor Kepala Desa Sei Beberas Hilir

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	5	Baik
2	Telepon	1	Baik
3	Mesin tik	1	Baik
4	Meja	15	Baik
5	Kursi	72	Baik
6	Almari arsip	5	Baik
7	Kendaraan dinas	3	Baik
	Total	102	

Sumber : *Profil Desa Sei Beberas Hilir 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pada kantor Kepala Desa Sei Beberas Hilir sebagai penunjang jalannya pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan pada pemerintahan desa sudah cukup lengkap dan pada kondisi baik. Jarak Desa Sei Beberas Hilir dengan Kecamatan Lubuk Batu Jaya berjarak sekitar 4 kilometer dengan lama jarak tempuh kurang lebih 15 menit. Jarak Desa Sei Beberas Hilir dengan Ibukota Kabupaten berjarak sekitar 56 kilometer dengan lama jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Keadaan jalan Desa Sei Beberas Hilir menuju Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan ibukota Kabupaten Indragiri Hulu belum diaspal. Untuk jalan utama yang ada di Desa Sei Beberas Hilir yang sudah diaspal sepanjang 3 Kilometer, dan sebagiannya lagi belum diaspal. Sedangkan jalan-jalan yang lainnya masih banyak berlobang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun dalam bidang kesehatan Desa Sei Beberas Hilir memiliki 1 unit Puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu yang ada di Desa Sei Beberas Hilir memiliki 1 unit ambulance yang siap 24 jam melayani masyarakat Desa Sei Beberas Hilir. Puskesmas Desa Sei Beberas Hilir sangat membantu masyarakat dengan adanya program-program yang telah dibuat sehingga masyarakat lebih terbantu dalam kesehatan.

Penduduk Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas menganut agama Islam. Sarana ibadah yang ada di Desa Sei Beberas Hilir adalah Masjid yang berjumlah 1 unit dan mushola 10 unit. Masjid dan mushola di Desa Sei Beberas Hilir dijadikan multifungsi disamping dijadikan sebagai sarana ibadah, pengajian, dan juga sering digunakan sebagai tempat musyawarah desa serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat sumber daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, lembaga pendidikan yang ada di Desa Sei Beberas Hilir sudah mulai berkembang diantaranya sudah terdapat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).

Lembaga pendidikan di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari :

- a. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 unit, dengan jumlah muridnya 30 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 5 orang
- b. Taman kanak-kanak (TK) 1 unit, dengan jumlah muridnya 54 orang dan tenaga pengajarnya berjumlah 6 orang.
- c. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 unit, dengan jumlah murid yang ada di SDN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

004 berjumlah 233 orang dengan jumlah pengajar 19 orang.

4.5 Pemerintahan

4.5.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kedudukan dan tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 4. Menetapkan peraturan desa
 5. Menetapkan APBDes
 6. Membina kehidupan masyarakat desa
 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
1. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 2. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
4. Memanfaatkan teknologi tepat guna
5. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
6. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
7. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak :

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Selain mempunyai hak, Kepala Desa juga berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
7. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, seta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
8. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
9. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
10. Mengelola keuangan dan aset desa
11. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
12. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
13. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
14. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
15. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
17. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dalam melaksanakan tugas, hak, kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

4.6 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Sei Beberas Hilir

Desa Sei Beberas Hilir memiliki aparatur desa sebanyak 11 orang. Dari bidang pendidikan aparatur Desa Sei Beberas Hilir belum memiliki aparat yang telah lulus sarjana, hanya ada 1 aparatur yang lulusan D1, dan 10 orang lulusan SMA/ sederajat. Tingkat pendidikan aparatur Desa Sei Beberas Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Sei Beberas Hilir(2019-2024)

No	NAMA	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	Suarno	Kepala Desa	SMA
2	Wirandi	Sekdes	D1
3	Zukri Ahmad Mubarokh	Kaur Umum dan Perencanaan	SMA
4	Maizarni	Kaur Keuangan	SMA
5	Nuri Wahyu. T	Staff Kaur Umum dan Perencanaan	SMA
6	Ambarwati	Staff Kaur Keuangan	SMA
7	Muh.Syahri	Seksi Pemerintahan	SMA
8	Suwandi	Seksi Kesejahteraan dan pelayanan	SMA
9	Edy Sumarno	Kadus sungai mulya	SMA
10	Febri Ari W.	Kadus Muara Kelaban	SMA
11	Muhofir	Kadus Muara Jaya	SMA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun susunan Pemerintahan Desa Sei Beberas Hilir dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sei Beberas Hilir



Sumber :Kantor Kepala Desa Sei Beberas Hilir 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI**KESIMPULAN DAN SARAN****6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu selama tahun 2017,2018 dan 2019 belum dilaksanakan dengan baik terlihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur yang belum di laksanakan oleh Pemerintah Desa jika melihat dari keseluruhan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPdes) Sei Beberas Hilir tahun 2017,2018 dan 2019 .
- b. Faktor penghambat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu pada tahun 2017,2018 dan 2019 ialah terelatak pada Sumber daya anggaran yang di miliki oleh Desa Sei Beberas Hilir ,terlihat dari sumber dana desa pada tahun 2017-2019 yang hanya berkisar 1,5 milyar dan sangat berbanding jauh dari total perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir yang hampir mencapai 7-8 milyar,hal tersebut membuat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir menjadi terhambat .
- c. Bila di tinjau dari sudut pandang islam terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir ,maka Pembangunannya telah sesuai dengan Konsep Pembangunan Islam ,terlihat dari beberapa tahapan dalam pembangunan islam yaitu antara lain adalah tahapan Pembangunan kerohanian ,seperti meningkatnya nilai moril yang berlaku di Masyarakat dikarenakan adanya unsur penunjang



infrastruktur yang berada di Desa Sei Beberas Hilir, dan kemudian pada Tahapan Pembangunan fisik telah sesuai dari apa yang terlihat pada manfaat pembangunan tersebut untuk Desa.

6.2 Saran

Adapun saran Peneliti mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sei Beberas Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang paling diprioritaskan.
- b. Dalam melaksanakan pembangunan pemerintah desa harus benar-benar memperhitungkan apa saja yang harus dipersiapkan dan paham terhadap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Desa Sei Beberas Hilir terutama pada sumber daya anggaran.
- c. Pengawasan harus lebih ketat terhadap pelaksanaan pembangunan untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan dana ataupun material pembangunan yang tidak layak.
- d. Untuk semua masyarakat harus selalu bergotong royong untuk memperbaiki jalan jika jalan ada yang rusak ataupun sarana desa yang dianggap diperlukan bagi kepentingan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e. Evaluasi yang dilakukan terhadap pembangunan haruslah benar-benar diperhatikan untuk di penilaian pembangunan pada periode berikutnya
- f. Penelitian menyarankan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) semua masyarakat ikut serta dalam musyawarah agar semua masyarakat dapat mengaspirasikan apa saja yang di butuhkan masyarakat dan mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi desa dalam melaksanakan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Infrastruktur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Hendayani, R. (2014). *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alaudin University Press.
- Winarno, Budi. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta : Media Pressindo 2005)
- Firadus, R. b. (2009). *Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia*. Jurnal.
- Artikel, *Kebijakan Infrastruktur, Kritis Pada Implementasi*, Oleh Didik J Rachbini.
- Huda, Ni'matul, (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang
- Ahmad Farouk, M Yasin dkk, (2015), *Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa*, Pattiro, Jak
- Purnomo, Joko, (2016), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta
- Ahmeduddin dan Beni Ahmad. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamidi. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Widjaja, Haw. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Anggraini, Yusniah. (2018). *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Indocamp

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satrio, Arif Dkk, *Menuju Desa 2030*, Bogor: Crestpent Press. 2011.

Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta:Penerbit Erlangga. 2010.

Karim, Gaffar, Abdul. *Persoalan Otonomi Daerah*. Jakarta:PustakaPelajar. 2006

Murta, *Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 2017.

Asmad, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Desa Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Jurusan Pengembangan Masyarakat islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau , 2021.

Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes) Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu 2017

Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes) Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu 2018

Rencana Kerja Pembangunan (RKPDes) Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu 2019

Data Monografi Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu 2020

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SEI BEBERAS HILIR

1. Menurut bapak/ibuk bagaimana pembangunan infrastruktur yang berjalan di desa sei beberas hilir ?
2. Menurut abg/kakak informasi mengenai pembangunan infrastruktur telah di beritahukan atau belum ?, dan kalau belum bagaimana caranya abg/kakak dapat mengetahui adanya pembangunan? (pertanyaan informasi)
3. Apakah bapak kepala dusun telah menyampaikan informasi ,mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat desa? (pertanyaan informasi)
4. Apakah ibuk RT 07 telah melaksanakan tugas yang di berikan oleh kepala dusun kepada ibuk untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa sei beberas hilir?(pertanyaan informasi)
5. Apakah telah di beri infomasi mengenai pembangunan infrastruktur kepada masyarakat desa? Dan apabila ada kemudian bagaimanakah prosedurnya atau cara kerjanya?(pertanyaan transmisi/sekdes)
6. Apakah abg mengetahui kapan dan tujuan pembanguna di lakuakn?(pertanyaan Transmisi/Bpk. yusuf)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bagaimanakah kejelasan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini di transmisikan atau di sampaikan kepada penyelenggara seperti kepada pelaksana, target grup atau masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan .sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud ,tujuan ,sasaran ,serta substansi.(Kejelasan/sekdes)
8. Menurut bapak wirandy apakah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut telah konsisten atau tidak ada lagi keragu-raguan sehingga tidak membingungkan para pelaksana, masyarakat desa, dan pihak-pihak lainnya.(konsistensi/sekdes)
9. Menurut Bpk.Wirandy apakah selama periode pembangunan tahun 2017,2018,& 2019 tidak ada perubahan pada RKP desa?(perubahan RKP/sekdes)
10. Apa faktor dan penyebab mengenai penyusunan RKP pada tiap tahunnya yang tidak menyesuaikan dengan dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat?(sumber daya Anggaran/sekdes)
11. Apakah peraturan-peraturan atau ketentuan pada PDTT tahun 2019 tersebut yang telah di tetapkank oleh pemerintah sudah di implementasikan atau di terapkan oleh pemerintah desa selama peraturan tersebut di keluarkan?(Struktur Birokrasi ketentuan-ketentuan /sekdes)
12. Dilihat dari RKP desa mengenai program pembangunan infrastruktur di desa sei beberas hilir ada banyak sekali perencanaan pembangunan yang

melebihi sumber daya anggaran desa sei beberas hilir ,kira-kira apa penyebab hal itu terjadi?(sumber daya anggaran/kaur umum dan perencanaan)

13. Bagaimana pemerintah desa sebagai pelaksana dalam mengurus sumber daya peralatan seperti sarana ,gedung, alat-alat ,tanah, dan lain-lain?(sumber daya peralatan/kaur umum dan perencanaan)

14. Apakah benar adanya insentif atau bonus yang di berikan oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan ,apabila ada maka bagaimanakah cara atau mekanisme yang dilakukan ,dan juga berapa yang di berikan (insentif/ kaur umum dan perencanaan)

15. Dalam membangun infrastrukturnya ada pekerja/tukang ,audit apalagi kalau ada di bentuk nya TPK (tim pelaksana kegiatan),maka akan ada banyak para pelaksana dengan bidang nya masing-masing ,itu bagaimana cara mengaturnya dan Selama berjalannya pengerjaan pembangunan apakah ada salah paham dan cekcok sana sini,dari pengalaman bapak sebagai pelaksana kegiatan? (fragmentasi/ kaur umum dan perencanaan)

16. Sehubungan dengan pendidikan terakhir para SDM pelaksana pembangunan infrastruktur yang hampir keseluruhan bertamatkann SMA,apakah hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja pembangunan?(SDM/kades)

17. Bagaimana cara kerja bapak sebagai kepala desa dalam hal kewenangan terakait pada pelaksanaan pembangunan inftrastruktur di desa sei beberas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilir ?(sumber daya kewenangan/Kades)

18. Apa yang dilakukan oleh bapak kepala desa dalam hal disposisi seperti pengangkatann atau penempatan posisi para pelaksana di dalam proyek pembangunan infrastruktur di desa sei beberas hilir ?(Disposisi/kades)
19. Apakah pemerintah desa memiliki insentif/bonus bagi para pelaksana pembangunan infrastruktur pada desa sei beberas hilir?(insentif/Kades)
20. Bagaimana pertanggung jawaban atau akuntabilitas yang dimiliki oleh para pelaksana pembangunan infrastruktur di desa sei beberas hilir?(struktur birokrasi,pertanggung jawaban/kades)
21. Apakah Pembangunan-pembangunan yang ada di desa Sei Beberas Hilir dapat meningkatkan Nilai Penjiwaan, Moral, dan Etika-etika yang baik, atau dapat berakibat kepada sebaliknya ?(Tahapan Pembangunan kerohanian/ bapak rizal)
22. Apakah Pembangunan-pembangunan yang dilakukan dapat membangun ekonomi masyarakat desa , dan dapat berdampak pada kemaslahatan Orang banyak?(Tahapan Pembangunan Fisikal/Bapak Dedi)
23. Apakah bila desa membangun ,pihak desa datang ngasih kabar ngak adanya pembangunan?(Komunikasi/ bapak Topa)
24. Apakah seluruh masyarkat mengetahui informasi mengenai bila adanya proyek pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa?(Komunikasi/ Bapak yusuf)

Lampiran 2

Halaman depan kantor kepala desa Sei beberas hilir kecamatan Lubuk batu jaya kabupaten Indragiri hulu bersama Sekretaris desa sei beberas hilir



Wawancara Bersama bapak Wirandy ,Sekretaris desa Sei beberas hilir (2019-2024)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Kepala Desa Sei beberas hilir ,Bapak Suarno (2014-2019),(2019-2024) periode ke -2



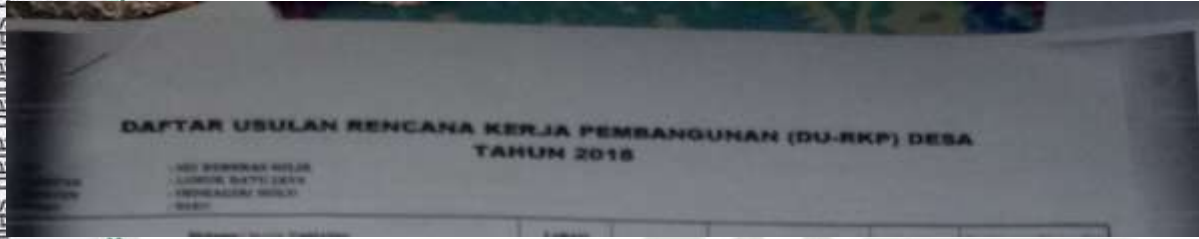
Wawancara Bersama kaur umum dan perencanaan desa Sei beberas hilir, zukri ahmad mubarokh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPdesa) tentang usulan Rencana pembangunan infrastruktur desa Si beberas hilir



No	Kategori	No Urut	Judul Usulan	Luas (M ²)	Kategori	Tipe	Rincian Per Bidang		Total (Rp)
							1	2	
1	Peningkatan Standar Infrastruktur	1	Peningkatan J. Persegi 1	200 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2018		1.200.000.000	
2		2	200 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2018		200.000.000		
3		3	Pembuatan Tangkai Listrik - Jaringan Listrik	50 M	Peningkatan Ekonomi dan Peningkatan Masyarakat	2018		80.000.000	
4		4	Pembuatan Pagar	2000 M	Ketercapaian Akses Air	2018		100.000.000	
5		5	Pembangunan Rumah Lestari	5 Lahu	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2018		200.000.000	
6		6	Paving Block Masjid Miftahul Jannah	600 M ²	Ketercapaian Swasida	2018		40.000.000	
7		7	Paving Block PCTA	400 M ²	Ketercapaian Pendidikan	2018		40.000.000	
8		8	Pembangunan Lampu Peningkatan J. Persegi	25 M ²	Peningkatan Ekonomi dan Peningkatan Masyarakat	2018		12.500.000	
9		9	Pembuatan Jalan Baru	2500 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2018		100.000.000	
10		10	Pembangunan Pagar Masjid Miftahul Jannah	300 M	Ketercapaian Swasida	2018		100.000.000	

No	Judul Usulan	Luas (M ²)	Kategori	Jumlah/ Maksimal	Waktu Pelaksanaan	Estimasi Biaya dan Sumber Pendanaan
33	Pembangunan Gedung Dinkes (DPR) Desa	1000 M ²	Desa II	30 x 25 x 10	2018	150.000.000
34	Pembangunan Jalan Baru	500 M	Desa I & II	500 M	2018	200.000.000
35	Pembangunan Gedung Satek Desa	1 Lahu	Desa II	1 Lahu	2018	100.000.000
36	Pembangunan Rumah UED BP	1 Lahu	Desa II	1 Lahu	2018	50.000.000
37	Pembangunan Paving Block Halaman Kantor Desa	1000 M ²	Desa I & II	1 Paket	2018	100.000.000
38	Pembuatan Pagar Juku	2000 M	Desa I & II	2 Paket	2018	200.000.000
39	Pembuatan Drainase Kuning Lapangan Sepak Bola	1 Paket	Desa I	1 Paket	2018	200.000.000
40	Pembuatan Cusur Kamboran	1 Lahu	Desa II	1 Lahu	2018	100.000.000
41	Pembangunan Pagar dan Paving Block Kantor Desa	1 Paket	Desa II	1 Paket	2018	80.000.000
42	Pembangunan Tiang Miti Lapangan Sepak Bola	1 Lahu	Desa I	1 Lahu	2018	100.000.000
Jumlah Per Bidang						6.100.000.000

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA SEI BERAS HILIR KEC. LUBUK BATU JAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

01/2017
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN

1.1. Pelaksanaan Pembangunan Desa
1.2. Jalan Perumahan (RD 12)
P. 004.1.02.T.012.M
No. 01/2017
Des. Sei Beras Hilir

SUMBER PEMBIAYAAN

NO	J.A.A.R.	UJI	VOLUME	HARGA		LOKASI
				Perkiraan RAB	Perkiraan RAB	
1	2	3	4	5	6+7(8)+8	9
B. BELANJA KECIL						
M A A N I						
1	Bahan Pokok & B. PK	ml	500,00	75.000	37.500.000	30.000
2	Pajak Peng. & B. PK	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
3	Barang	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
4	Barang Bekas (B. Bekas)	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
5	Pajak Peng. & B. PK	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
6	Pajak Peng. & B. PK	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
7	Pajak Peng. & B. PK	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
8	Pajak Peng. & B. PK	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
9	Pajak Peng. & B. PK	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
10	Pajak Peng. & B. PK	ml	50,00	127.000	6.350.000	30.000
LOKASI						75.000.000
M A A N I						
1	Uang Tunai	ml	100,00	100.000	10.000.000	30.000
2	Uang Tunai	ml	100,00	100.000	10.000.000	30.000
3	Uang Tunai	ml	100,00	100.000	10.000.000	30.000
LOKASI						100.000.000
M A A N I						100.000.000
1	Pajak Peng. & B. PK	ml	100,00	100.000	10.000.000	30.000
2	Pajak Peng. & B. PK	ml	100,00	100.000	10.000.000	30.000
LOKASI						100.000.000
TOTAL (A+B+C+D+E)						313.010.000
REVISI/PERUBAHAN						313.010.000
TOTAL						

Desa Sei Beras Hilir
Kecamatan Lubuk Batu Jaya
Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau

Desa Sei Beras Hilir
Kecamatan Lubuk Batu Jaya
Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau

Salah satu Rincian anggaran biaya(RAB) pembangunan infrastruktur desa Si beberas hilir

- Hak Cipta Dinding**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu program Pembangunan infrastruktur Desa Sei beberas hilir tahun 2019 ,GOR lapangan futsal/serba guna



Hak Cipta Dilindungi U

1. Dilarang mengutip, seveugian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

Hak Cipta Dilin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. (77) 562651
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1782/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 10 Maret 2021 M

Kepada
Yth. Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fachruzi Juan syahputra
NIM : 11775102513
Prodi : Administrasi Negara SI
Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Skripsi Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"Analisis Pelaksanaan Pembangunan Insfratraktur di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu".
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga


Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2615/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 03 Mei 2021 M
21 Ramadhan 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Desa Sei Beberas Hilir
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fachruzi Juan Syahputra
NIM. : 11775102513
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sei Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ultan Syarif Kasim



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN LUBU BATU JAYA
DESA SEI BEBERAS HILIR

Jl. Narasinga I, Desa Sei Beberas Hilir, kode Pos : 29359

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 47/2004/SBH/VIII/2021

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirandi
 Jabatan : Sekretaris Desa Sei Beberas Hilir
 Alamat : RT 05 RW 02 Dusun Sungai Mulya Desa Sei Beberas hilir

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Fachruzi Juan Syahputra
 NIM : 11775102513
 Program Studi : Administrasi Negara
 Alamat : Jl.Perkasa, Gg. Perkasa III No.04
 Sekolah/Univ. : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu selama 3 bulan, terhitung mulai tanggal 03 Mei s/d 22 Agustus 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SEI BEBERAS HILIR KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRIHULU".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Beberas hilir, 22 Agustus 2021

An. KEPALA DESA SEI BEBERAS HILIR



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Fachruzi Juan Syahputra , lahir pada tanggal 25 Juli 1999 di kota Pekanbaru, penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara dari ayah yang bernama Ismed Munir dan Ibu yang bernama Maimunah zubir. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Annur Pekanbaru tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan

Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Pekanbaru selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Pekanbaru selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis diterima melalui jalur SBMPTN.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor KPU Provisnis Riau tepatnya pada Bagian Umum. Dan juga penulis telah mengabdikan di masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

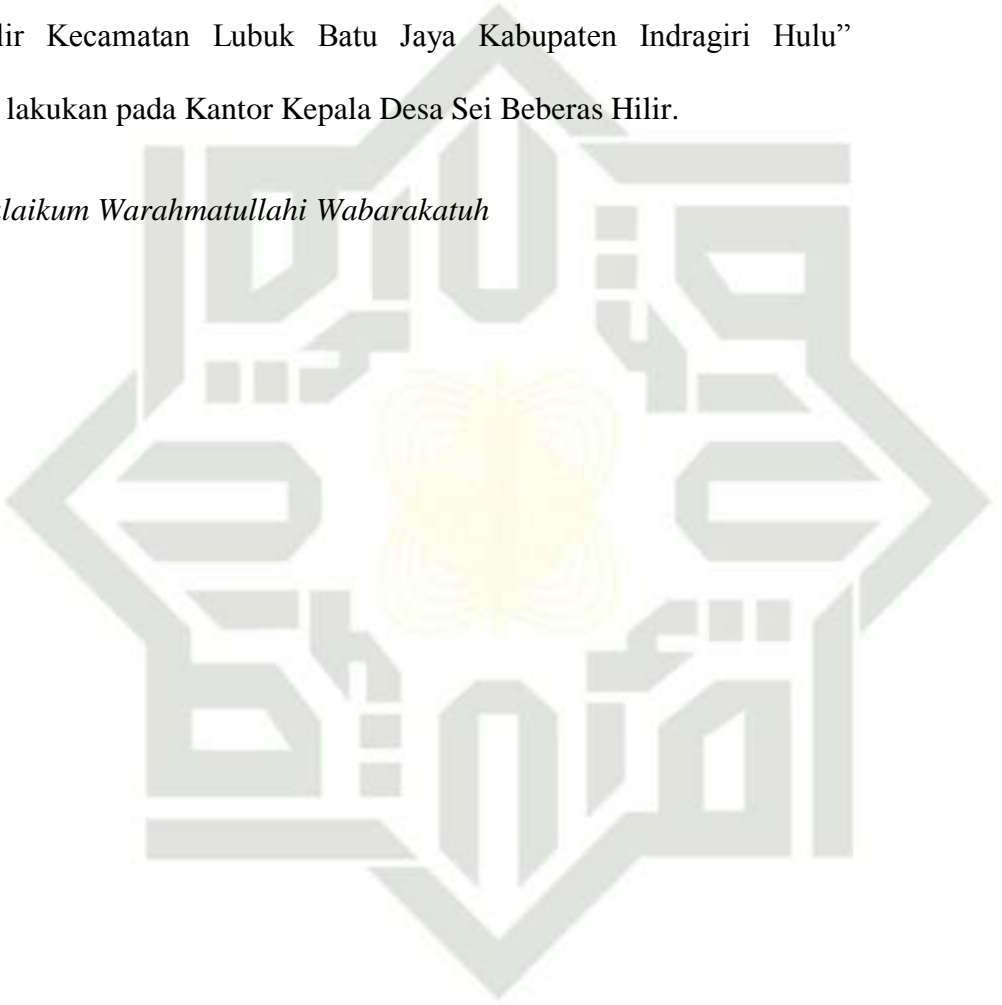
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 23 September penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan
Judul Skripsi “ Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sei
Beberas Hilir Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu”
penelitian di lakukan pada Kantor Kepala Desa Sei Beberas Hilir.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.